

JADI PUSTAKAWAN DI PERGURUAN TINGGI, KENAPA HARUS TAKUT?

Isti Mawaddah

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: istimawaddah79@gmail.com

Abstrak: *Pustakawan dan Perpustakaan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang, dimana ada Perpustakaan, maka idealnya disitu juga harus ada pustakawan. Namun pada kenyataannya, banyak sekali Perpustakaan yang di dalamnya tidak ada Pustakawan. Sehingga Perpustakaan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Perpustakaan Perguruan Tinggi sering dimaknai sebagai pusat penelitian karena banyak menyediakan informasi yang berkaitan dengan sarana pendukung dalam proses penelitian yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jarangnya profesi Pustakawan merupakan salah satu kendala di Perguruan Tinggi. Sebagai ilmuwan, Pustakawan harus mampu memberdayakan informasi bukan sekadar melayani informasi. Sehingga pengakuan akan kompetensi akan segera terwujud dengan adanya sertifikasi Pustakawan. Bagi kebanyakan orang, profesi Pustakawan merupakan profesi yang belum terlalu diperhitungkan, karena kebanyakan mereka menilai sebuah profesi diukur dengan besar kecilnya materi yang diperoleh. Tapi yakinlah kalau menjadi Pustakawan di perguruan tinggi akan menjanjikan masa depan yang cerah.*

Kata kunci : *Pustakawan, Perguruan Tinggi, Perpustakaan*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, profesi Pustakawan masih sering dilihat sebelah mata oleh sebagian masyarakat kita, bahkan oleh kalangan terpelajar sekalipun. Masyarakat belum banyak memerlukan jasa layanan Perpustakaan yang ditawarkan Pustakawan. Bahkan ada yang belum mengetahui eksistensi profesi Pustakawan.

Tampaknya profesi ini masih sering dianggap lebih rendah dari profesi-profesi lain. Selain masyarakat yang belum mengetahui eksistensi Pustakawan, kadang kitapun masih menemukan Pustakawan yang enggan atau malu mengakui dirinya sebagai Pustakawan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para Pustakawan, diantaranya adalah merumuskan kode etik Pustakawan, menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya dan lain-lain di dalam upaya menyempurnakan prosedur

penyelenggaraan Perpustakaan dan meningkatkan teknik-teknik pelayanan informasi. Namun mengapa keprofesionalan dan profesi Pustakawan masih kurang mendapat pengakuan yang wajar di masyarakat.

Profesi Pustakawan sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan di kalangan Pustakawan sendiri. Tak banyak orang yang mengenal dan mengetahui siapa itu Pustakawan dan apa pekerjaannya. Masyarakat umumnya tahu bahwa di Perpustakaan ada pekerja yang memberikan layanan informasi, namun seringkali mereka tidak tahu siapakah yang disebut Pustakawan itu. Bahkan mendengar kata ‘Pustakawan’ saja pun mungkin jarang. Hal ini mudah sekali diketahui. Tanyakanlah kepada masyarakat umum :”siapakah yang bekerja di Perpustakaan?” Hampir dapat dipastikan, jawabannya adalah :”petugas Perpustakaan, atau karyawan.” Atau coba tanyakan kepada anak-anak yang masih kecil :’kalau sudah besar, kamu mau jadi apa?’ Seringkah atau pernahkah anda mendengar ada anak yang menjawab :”aku mau jadi Pustakawan!” Jawaban yang lazim terdengar adalah :”aku mau jadi dokter, pilot, pramugari, presiden, guru, artis, pengacara.”

Menjadi Pustakawan memang tidak mudah. Selain tidak populer, pekerjaan ini juga ditengarai tidak menjamin kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Berbeda jauh dari profesi dokter misalnya. Seorang dokter, sekalipun sedang menganggur, tapi apresiasi masyarakat terhadap profesinya tak pernah surut. Mendengar kata :’dia itu dokter lho”, rasanya orang sudah hormat padanya. Artinya, status sosial seorang dokter, sekalipun dalam kondisi tidak berpenghasilan, tetap lebih layak dan lebih terhormat. Lalu jika dibandingkan dengan profesi Guru pun, Pustakawan tetap kalah populer. Guru, sekalipun dianggap profesi yang tidak menjamin kehidupan ekonomi yang lebih baik, tapi di mata masyarakat tetap memiliki kesan tersendiri. masyarakat hormat pada Guru. Bahkan menyebutnya sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Banyak juga penghormatan simbolis yang ditujukan kepada guru, seperti hari guru, lagu-lagu untuk guru, dan kata-kata mutiara tentang guru. Pustakawan? Masih jarang terdengar hal-hal seperti itu.

Lalu, di mana sebetulnya letak persoalannya? Mengapa profesi Pustakawan tidak sepopuler profesi lain yang notabene sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh Pustakawan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa mereka eksis?

Sementara perhatian pemerintah sendiri untuk Pustakawan saat ini juga belum seperti perhatiannya kepada profesi yang lain misalnya profesi dokter, hakim, jaksa, pengacara dan profesi lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan Perpustakaan belum seperti kebutuhan mereka akan profesi

yang lain. Mereka lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi terlebih dahulu sebelum menjadikan Perpustakaan sebagai prioritas utama mereka.

Wiji Suwarno (2010:46) mengatakan bahwa perpustakaan masih merupakan keinginan (*wants*) dari pada kebutuhan (*needs*) bagi sementara orang. Ini artinya bahwa kesadaran dan kepentingan mereka terhadap Perpustakaan sebagai sumber informasi mulai ada, mulai menggejala dan berkembang tetapi belum menjadi prioritas yang utama. Satu contoh dalam dunia kampus, sebenarnya banyak mahasiswa yang ingin berkunjung ke Perpustakaan, ingin membaca buku, ingin meminjam buku, dan seterusnya, namun itu baru sebatas keinginan saja, belum diwujudkan dalam tindakan nyata dengan datang ke Perpustakaan, kemudian di sana membaca buku, meminjam buku dan seterusnya. Mahasiswa biasanya mau berkunjung ke Perpustakaan manakala terbentur dengan keadaan yang memaksa, misalnya karena ada tugas dari dosen, atau menyelesaikan Tugas Akhir, sehingga mereka baru buru-buru ke Perpustakaan. Akan berbeda manakala ketika Perpustakaan sudah menjadi kebutuhan bagi mahasiswa, mereka akan datang ke Perpustakaan baik ada ataupun tidak ada tugas dari dosen. Di satu sisi menjadikan Perpustakaan yang representatif dan layak digunakan oleh masyarakat luas juga bukan sesuatu yang mudah dan menjadi tantangan bagi para Pustakawan sebagai motor penggerak kemajuan Perpustakaan.

Hal ini senada dengan ungkapan Sutarno (2005:13) bahwa faktor yang menyebabkan Perpustakaan belum dapat berkembang dan masih belum bisa berdiri sendiri di antaranya adalah pengelola Perpustakaan, sumber informasi dan masyarakat pengguna. Pengelola Perpustakaan yang dimaksud adalah Pustakawan sebagai penentu kemajuan sebuah Perpustakaan. Dibutuhkan kemampuan yang luar biasa untuk memajukan sebuah Perpustakaan. Berbagai tantangan dan rintangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan para Pustakawan untuk memajukan Perpustakaan.

Namun begitu, Pustakawan tidak boleh berputus asa menghadapi tantangan tersebut, justru Pustakawan harus senantiasa berusaha terus menerus tanpa merasa bosan untuk memperjuangkan Perpustakaan dan organisasi Pustakawan agar di perhatikan oleh pemerintah. Menjadi sebuah tugas rumah yang tidak ringan untuk mencapai hal ini, namun bukan sesuatu yang mustahil jika para Pustakawan bersama-sama mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalismenya dengan berbagai ketrampilan yang dimiliki.

B. Pembahasan

Perpustakaan, Pemustaka dan Pustakawan

Di Perpustakaan Perguruan Tinggi sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting karena merupakan ujung tombak dan ujung kekuatan proses pemberian dan penerimaan informasi dari sumber informasi dalam hal ini pengelola Perpustakaan dan pemanfaat informasi atau pengguna (pemustaka). Berikut ini kami jelaskan ketiga istilah tersebut :

a. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dan Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

b. Pemustaka/Pengguna/User

Pada dasarnya Perpustakaan tidak akan ada artinya apabila tidak ada pengunjung yang memanfaatkan atau menggunakan bahan pustaka/koleksinya yaitu user/pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. Jumlah personal yang datang ke Perpustakaan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu Perpustakaan. Terdapat 2 katagori pemustaka yaitu *potential user* (adalah jumlah civitas akademika yang ada pada PT) dan *actual users* (merupakan civitas akademika yang memanfaatkan Perpustakaan/pemustaka yang datang ke perpustakaan/pemustaka riil).

c. Tenaga Pengelola Perpustakaan/Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dan Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan , dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah.

Terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh para pengelola PPT pada era global antara lain : (1) Memiliki Pendidikan dan Ketrampilan Tentang Kepustakawanan, (2) Memiliki Ketrampilan Pemanfaatan Teknologi Informasi, (3) Memiliki Ketrampilan Bahasa, (4) Mengetahui Kebutuhan Pemustaka, dan (5) Sense of Media.

Tujuan, Fungsi dan Tugas Perpustakaan Perguruan Tinggi

Adapun sisi lain tujuannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari suatu Perguruan Tinggi yang bersama-sama dengan unit lain melakukan kegiatannya sehingga terlaksana penyelenggaraan dalam membantu lembaga induknya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut Sulisty Basuki, tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah:

1. Untuk memenuhi keperluan informasi masyarakat Perguruan Tinggi, lazimnya staf pengajar dan mahasiswa sering pula mencakup tenaga administrasi Perguruan Tinggi;
2. Menyediakan bahan pustaka rujukan (reference) pada semua tingkat akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa program pasca sarjana dan pengajar;
3. Menyediakan ruang belajar untuk pemakai Perpustakaan;
4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai;
5. Menyediakan jenis informasi aktif yang tidak hanya terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga induknya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebagai penyedia jasa pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pelestarian, pengolahan, pemanfaatan dan penyebaran informasi sehingga dapat dimanfaatkan pengguna, penyediaan fasilitas yang mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika, pemberian berbagai jasa informasi serta pengembangan mutu Perguruan Tinggi pada tempatnya bernaung.

Untuk mencapai tujuan yang sempurna harus didukung juga dengan fungsinya. Adapun fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah:

1. Fungsi Edukasi : Perpustakaan merupakan sumber belajar para civitas akademika, oleh karena itu Perpustakaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan menyediakan bahan pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung pelaksana evaluasi pembelajaran.
2. Fungsi Informasi : Perpustakaan merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi.
3. Fungsi Riset : Perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Fungsi Rekreasi : Perpustakaan harus menyediakan koleksi kreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan

daya inovasi pengguna Perpustakaan.

5. Fungsi Publikasi : Perpustakaan selayaknya juga membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga Perguruan Tinggi nya yakni civitas akademika dan staf non-akademik.
6. Fungsi Deposit : Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga Perguruan Tinggi nya.
7. Fungsi Interpretasi : Perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimilikinya untuk membantu pengguna dalam melakukan dharmanya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi sebuah Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebagai sarana penyediaan fasilitas pengajaran dan penelitian untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan civitas akademiknya yang memiliki kualitas koleksi yang memadai dan sesuai terhadap kebutuhan sehingga menimbulkan kepuasan akan kebutuhan informasi para pengguna.

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya dengan baik Perpustakaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, bahwa tugas Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah:

1. Mengikuti perkembangan perkuliahan dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengajaran.
2. Menyediakan pustaka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka studinya.
3. Mengikuti perkembangan program-program penelitian yang diselenggarakan di lingkungan Perguruan Tinggi induknya dan berusaha menyediakan literatur ilmiah dan bahan lain yang diperlukan bagi peneliti.
4. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan-terbitan yang baru baik terbitan cetak maupun tidak tercetak.
5. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna mengakses Perpustakaan lain maupun pangkalan-pangkalan data melalui jaringan lokal (intranet) maupun global (internet) dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan.

Apakah Susah Jadi Pustakawan

Menjadi “Pustakawan” di Indonesia itu gampang-gampang susah. Gampangnya, pendidikan kepustakawanan mudah didapat di mana saja, bahkan

pendidikan setingkat D2 pun masih ada, terutama yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Dahulu malah keterampilan Perpustakaan diberikan dalam bentuk kursus. Susahnya, mendapat predikat “Pustakawan” itu ternyata lain soal dengan mengecap pendidikan Perpustakaan. Seorang sarjana Ilmu Perpustakaan bahkan tidak serta-merta menyandang profesi “Pustakawan”, pun jika ia kemudian bekerja di Perpustakaan, termasuk pula siapa saja yang bekerja di Perpustakaan.

Istilah “Pustakawan” sendiri tampaknya masih “asing” di telinga masyarakat Indonesia. Kita terbiasa menyebut mereka yang melayani kita ketika di Perpustakaan dengan sebutan “petugas”, bukan “Pustakawan”. Di satu sisi, kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya lebih dari sekadar pekerja. Mereka adalah profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Perpustakaan. Di sisi lain, kita tahu itu, bahwa Perpustakaan ada ilmunya, ada sekolahnya, dan bukan semata kegiatan keterampilan seperti menjahit atau rias pengantin. Namun demikian, kita tetap menyebut mereka “petugas”, sementara kita tahu, “Pustakawan” itu ada. Mengapa kita tidak menyebut mereka Pustakawan”? barangkali, ini seperti dua hal antara penulis dan sastrawan. Mungkin semua orang bisa menulis dan dijuluki sebagai “penulis”, namun hanya orang tertentu yang layak disebut “sastrawan” meskipun tak berlatar belakang (pendidikan) sastra. Begitu pula, mungkin semua orang bisa menjadi “petugas Perpustakaan” disebabkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang Perpustakaan atau karena ia bekerja di bidang perpustakaan. Namun, hanya orang tertentulah yang layak disebut “pustakawan”.

Saya melihat di sini bahwa kedudukan pustakawan sebagai sebuah profesi di Indonesia masih belum stabil. Di satu sisi, pemerintah melalui institusi perpustakaan berusaha merumuskan dan menempatkan pustakawan pada posisi yang tepat. Namun, di sisi lain, banyak kebijakan yang menurut saya rancu. Dalam hal ini, saya melihat bahwa profesi pustakawan seperti terbagi menjadi dua: antara pustakawan produk institusi pemerintah dan pustakawan produk akademi. Sebagai contoh, di perpustakaan pemerintah, profesi pustakawan dimasukkan sebagai salah satu jabatan fungsional. Ini mengindikasikan hal yang jauh sekali dari hakikat, sebab artinya, setiap pegawai yang berlatar pendidikan jurusan ilmu perpustakaan yang bekerja di perpustakaan pemerintah tersebut, tidak akan pernah “layak” menyandang predikat “Pustakawan” selama ia belum mengajukan diri sebagai pejabat fungsional Pustakawan. Jadi, selama itulah ia tetap “pegawai Perpustakaan” namanya, bukan “Pustakawan” meskipun ahli.

Setiap pegawai yang berlatar pendidikan disiplin ilmu lain yang bekerja di Perpustakaan pemerintah, boleh menyandang predikat “Pustakawan” dengan

syarat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai Pustakawan. Di sini ia mempelajari ilmu Perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, yaitu hanya beberapa bulan. Jika sudah, maka ia berhak mengajukan diri sebagai “Pustakawan”. Mudah sekali, bukan? Terlepas dari itu, banyak sekali orang yang tidak memiliki latar belakang Ilmu Perpustakaan ditempatkan di bidang Perpustakaan, seakan Indonesia tak punya lulusan jurusan Ilmu Perpustakaan saja. Ini seperti yang dilakukan beberapa bulan lalu oleh Jokowi yang beritanya cukup mengehebohkan itu. Solusinya sebenarnya sederhana saja. Kepala perpustakaan yang baru itu perlu diikuti diklat tenaga ahli di bidang Perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam UU Perpustakaan sebab sebenarnya Perpustakaan bisa dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli. Tenaga ahli di bidang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang Perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Penjelasan Pasal 30).

Ketidakstabilan Pustakawan di negara kita barangkali salah satunya dipicu oleh kebijakan pemerintah melalui institusi Perpustakaannya. Itulah sebabnya saya katakan di awal, menjadi “Pustakawan” di Indonesia itu gampang-gampang susah. Kita bisa menjadi “Pustakawan” (karbitan) dengan mudah kalau mau. Institusi Perpustakaan di negara kita menyediakan fasilitas untuk itu. Syaratnya, kita bisa menjadi PNS dulu, lalu minta ditempatkan di bagian Perpustakaan dan mengajukan diri untuk mengikuti diklat. Selanjutnya, daftarkan diri kita sebagai pejabat fungsional Pustakawan. Maka, jadilah kita Pustakawan dengan embel-embel “karbitan”. Kita tinggal menunggu serbuan dengki dari para lulusan jurusan Ilmu Perpustakaan. Kata mereka, “Segampang itu mereka menjadi Pustakawan, sementara kami yang Pustakawan untuk mendapatkan pengakuan profesionalitas saja susah. Beginilah nasib profesi Pustakawan di negara kita.

Jabatan Fungsional Pustakawan diakui eksistensinya berdasarkan Kep Men-PAN Nomor. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut diikuti Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2003 dan No. 21 Tahun 2003. Dilengkapi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.2 Tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dan Pemerintah memutuskan dengan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/M Pan/2002, Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan,

Dokumentasi, dan Informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Sampai saat ini, jabatan fungsional Pustakawan di lingkungan pemerintah daerah (kabupaten/kota) memang masih langka. Bahkan beberapa Perpustakaan umum daerah nihil dari jabatan ini. Bukan karena tak diperlukan, melainkan lebih disebabkan rendahnya minat PNS menjadi Pustakawan.

Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat terhadap kompetensi seseorang atau produk atau jasa, atau proses kegiatan lembaga yang telah sesuai dan/atau memenuhi standar yang dipersyaratkan (perpusna, 2011). Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui penilaian kerja nasional Indonesia dan/atau Internasional (pedoman BSNP, 2009). Sertifikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan berlaku apabila masih kompeten. Sertifikat ini berlaku untuk kompetensi yang paling akhir (*current competence*).
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi : dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga dengan lisensi/registrasi profesi. Kadang sertifikasi ini dikeluarkan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi profesi.
3. Sertifikat pelatihan yang diberikan oleh lembaga pelatihan, disebut dengan *certificate of attainment*, berlaku selamanya.

Sertifikasi Pustakawan yang telah lulus uji kompetensi dan melewati proses sertifikasi, mereka akan diberikan sertifikat sesuai dengan mengikuti uji kompetensi yang mereka jalani.

Tujuan Sertifikasi Pustakawan

Proses pemberian sertifikasi terhadap Pustakawan memiliki tujuan pokok bagi Pustakawan, yaitu :

1. Memberikan pengakuan formal (sertifikat) atas kompetensi yang dimiliki seorang Pustakawan telah sesuai standar.
2. Meningkatkan profesionalisme Pustakawan, dan menentukan kelayakan kesiapan seorang Pustakawan dalam memberikan layanan informasi secara baik dan benar atau layanan prima (Sertifikasi Kompetensi profesi)
3. Menghilangkan dikotomi Pustakawan PNS dan Pustakawan non PNS. Pustakawan yang telah mendapat sertifikasi akan memiliki kedudukan yang

sama terhadap pengakuan kemampuan mereka, karena adanya lembaga penjamin mutu (perpusnas, 2011)

Tujuan pemberian sertifikasi Pustakawan adalah menetapkan kualitas Pustakawan pada standard yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan, memberikan jaminan kualitas terhadap layanan Perpustakaan yang terbaik dengan layanan prima, melindungi dan mengelola sumber informasi yang dimiliki Perpustakaan, menjamin berlangsungnya pengelolaan profesi Pustakawan dengan baik, menjamin terlaksanannya program-program Perpustakaan, menjamin terpilihnya Pustakawan yang memenuhi standard kompetensi, dan mendorong peningkatan pendidikan bagi profesi Pustakawan.

Manfaat Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan terlaksana dengan baik dan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan sertifikasi ini maka jika ada seribu pekerjaan yang sama dan dilakukan di berbagai tempat oleh seribu orang yang berbeda tetapi memiliki tingkat kompetensi yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sama.

Dengan adanya sertifikasi profesi, bukan hanya organisasi yang menggunakan profesi tersebut yang mendapatkan jaminan hasilnya, tetapi juga seluruh pengguna hasil akhir organisasi tersebut akan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dalam jangka panjang dan berulang-ulang.

Beberapa manfaat sertifikasi Pustakawan

1. Untuk masyarakat pemustaka, adalah masyarakat yakin akan mendapatkan pelayanan yang baik secara kualitas maupun kuantitas akan kebutuhan informasi dan bahan pustaka yang dibutuhkan. Karena Pustakawan yang telah mendapat sertifikat tentu mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Masyarakat juga akan mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya karena Pustakawan yang bersangkutan dapat menjadi komunikator yang baik dengan melakukan layanan prima.
2. Untuk Perpustakaan, membantu Perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka akan produk/jasa telah dilakukan oleh tenaga-tenaga yang berkompeten, membantu Perpustakaan dalam proses rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi untuk efisiensi SDM, membantu perpustakaan untuk mendapatkan tenaga yang kompeten, dan memastikan serta

meningkatkan kinerja pustakawan.

3. Untuk Lembaga Pendidikan dan Latihan, adalah membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia kepustakawanan, memastikan tercapainya efisiensi pengembangan program diklat, memastikan pencapaian diklat yang tinggi, dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran.
4. Untuk pemerintah adalah membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM, kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM, dan target-target perencanaan program pembangunan pada sektor nya.
5. Untuk Pustakawan adalah membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk dan jasa, memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri, membantu dalam merencanakan karir, mengukur tingkat pencapaian kompetensi, membantu memenuhi persyaratan regulasi, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, dan membantu promosi profesi Pustakawan di pasar tenaga kerja.

Masa Depan Sertifikasi Pustakawan

Secara umum, masa depan sertifikasi di Indonesia sangat menjanjikan dan menguntungkan. Dengan demikian, rencana terealisasinya sertifikasi Pustakawan bukanlah hal yang mustahil. Tetapi, tetap saja kendala sekaligus tantangan yang harus segera diatasi dan dihadapi guna menemukan penyelesaian terbaik demi mewujudkan sertifikasi bagi Pustakawan ke depan.

Penyelesaian yang bisa dilakukan oleh lembaga yang terkait dan Pustakawan adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi lingkup kompetensi kepustakawanan atau LSP Pustakawan, menyelesaikan standar kompetensi pustakawan dengan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Sosialisasi dan publikasi SKKNI pustakawan, menyusun kurikulum berbasis unit kompetensi SKKNI, beserta bahan ajar terkait, menyusun pedoman yang diperlukan dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian dengan sertifikasi, menyelenggarakan diklat kompetensi terakreditasi baik untuk assessor maupun Pustakawan, perlu dilakukan pengembangan Perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menetapkan penyelenggara LSP, menyediakan dan membina assessor kompetensi bersertifikat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, membentuk dan menunjuk unit uji kompetensi dan perumusan berbagai instrumen uji kompetensi, dan membuat sistem registrasi dan data kompetensi Pustakawan.

Sebuah organisasi atau lembaga termasuk dalam hal ini Perpustakaan dikatakan bermutu apabila kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Kualitas tersebut dapat dicapai oleh sebuah Perpustakaan manapun termasuk Perpustakaan Perguruan Tinggi, dengan cara kerja keras, sehingga prestasi kerja lebih maksimal. Jika sebuah Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di lingkungannya, maka secara implisit pustakawan dan staf administrasi di Perpustakaan tersebut juga berkualitas. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas oleh pustakawan perguruan tinggi, maka tujuan yang ditetapkan oleh lembaga dapat tercapai.

Perpustakaan yang baik dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyajikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat pemakaiannya. Semakin baik pelayanannya, semakin tinggi penghargaan yang diberikan pada sebuah Perpustakaan, lengkapnya fasilitas yang ada, besarnya dana yang disediakan serta banyaknya tenaga Pustakawan, tidak berarti apa-apa bila Perpustakaan tersebut tidak mampu menyediakan pelayanan yang bermutu.

Tuntutan peningkatan kualitas kinerja Pustakawan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju, serta perkembangan tuntutan reformasi di tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara termasuk dalam hal ini pustakawan. Tuntutan reformasi ini pada dasarnya adalah terciptanya aparatur negara yang profesional dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

Profesionalisme Pustakawan

Profesionalisme Pustakawan mempunyai arti pelaksanaan kegiatan Perpustakaan yang didasarkan pada keahlian dan rasa tanggungjawab sebagai pengelola Perpustakaan. Keahlian menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja serta memecahkan masalah yang mungkin muncul. Sedangkan tanggungjawab merupakan proses kerja Pustakawan yang tidak semata-mata bersifat rutinitas, tetapi senantiasa dibarengi dengan upaya kegiatan yang bermutu melalui prosedur kerja yang benar. Ciri-ciri profesionalisme seorang Pustakawan dapat dilihat berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut;

- 1) memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya
- 2) memiliki tingkat kemandirian yang tinggi

- 3) memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama
- 4) senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik Pustakawan
- 5) senantiasa melihat ke depan atau berorientasi pada masa depan .

Pustakawan sebagai profesi semestinya memiliki keinginan tinggi meningkatkan produktivitas dan kinerjanya untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Keinginan yang tidak terlepas dari kebutuhan dan harapan individu dimana dia bekerja. Oleh sebab itu perilaku kompetisi dan profesionalisme ini menjadi salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut.

Pustakawan Ideal

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, bagi mereka yang hendak menjadi pustakawan ideal, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek profesional

Yaitu berpendidikan formal ilmu pengetahuan. Selain itu dituntut gemar membaca, terampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, berorientasi ke depan, mampu menyerap ilmu lain, obyektif (berorientasi pada data), tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu dipihak lain, berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi pustakawan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang kepustakawanan dan mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan.

b. Aspek kepribadian dan perilaku

Pustakawan Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan YME, bermoral Pancasila, mempunyai tanggungjawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas tinggi terhadap profesi, luwes, komunikasi dan sikap suka melayani, ramah dan simpatik, terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdisiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia.

Tetapi keterpurukan citra pustakawan dirusak oleh “Pustakawan” sendiri. Pada saat ini kita sedang menyaksikan sebuah fenomena yang memilukan, yaitu para pengelola Perpustakaan merasa malu atau minder mengenalkan dirinya sebagai pustakawan. Potret buram pustakawan dalam realitas keindonesiaan. Jika muncul sebuah pertanyaan: kapasitas apakah yang harus kita miliki untuk membangun citra pustakawan yang baik?

Jawaban pertanyaan ini sebenarnya kembali kepada persoalan visi, misi, dan fungsi Pustakawan. Secara umum kita dapat mengatakan yang diperlukan

untuk membangun citra adalah kompetensi kepakaran kita yang dibentuk oleh dua hal yaitu *hard skill* dan *soft skill*. Yang pertama lebih bersifat *scientific achievement*, sedangkan yang kedua bersifat *psychological achievement*. Yang pertama berkenaan dengan penguasaan teknis dan detail bidang kepustakawanan dan keperpustakaan, yang kedua berkaitan dengan kemampuan berpikir strategis sebagai perumus kebijakan, wawasan masa depan (*forward looking*), dan kemampuan perencanaan strategis, kemampuan perencanaan strategis, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi publik, dan lainnya. Kalau kita berkaca pada sejarah, disana kita akan menyaksikan Pustakawan menjadi elit politik dalam struktur sosial. Kedudukannya disejajarkan dengan tokoh spiritual dan para pemegang kebijakan, karena pada waktu itu memang Perpustakaan hanya ada di dua tempat yaitu di istana (pusat kekuasaan) dan kuil atau tempat ibadah (pusat kekuatan spiritual). Dari segi kompetensi pun seorang Pustakawan biasanya memiliki berbagai macam kecakapan (*multitalenta*) dan berbagai macam bahasa (*polilinguist*). Sebagai contoh kita lihat misalnya Jorge Luis Borges yang pernah mengatakan "*I have imagined that paradise will be a kind of library*". Ia menjadi Pustakawan dengan dilandasi oleh keinsafan bahwa menjadi pengelola Perpustakaan merupakan panggilan jiwa bukan sekedar panggilan tugas untuk mencari nafkah. Satu lagi contoh, yang dekat dengan kesejarahan kita, adalah GP Rouffaer, ia adalah seorang Pustakawan ahli pada lembaga studi kolonial (KITLV) yang menyusun *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie dan Debatikkunst in Nederlandsch-Indie en haar geschiedenis* (Seni Batik di Hindia Belanda dan Sejarahnya). Rouffaer juga dilibatkan oleh Alexander Idenburg, Menteri Urusan.

Jajahan, dalam penelitian tentang keadaan social, ekonomi, dan budaya masyarakat pribumi (Kompas, 8 Januari 2007). Borguis dan Rouffaer telah tiada dan mungkin hanya mereka berdualah Pustakawan ideal yang ada dalam sejarah peradaban manusia. Akan tetapi bukan hal yang mustahil bahwa citra ideal tersebut menjadi sebuah inspirasi untuk memulai membangun citra Pustakawan Indonesia.

C. Kesimpulan

Uraian sebagaimana yang dipaparkan diatas merupakan suatu peluang dan tantangan atau setidaknya mendorong pustakawan terutama di lingkungan, Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan jaman.

Memang tidak gampang jadi Pustakawan tetapi setidaknya juga tidak sulit untuk jadi pustakawan. Jadia kenapa kita harus takut? Banyak sekali yang

menjanjikan untuk jadi pustakawan bukan hanya materi tetapi karir juga akan lebih mudah dan mandiri. Berbagai bentuk peningkatan kesejahteraan untuk Pustakawan juga telah diupayakan oleh pemerintah misalnya dengan adanya wacana sertifikasi Pustakawan, walaupun sekarang belum terealisasi tapi kita berharap semoga segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. (2001). *Profesionalisme Pustakawan Di Era Global*. Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Pusat XI Ikatan Pustakawan Indonesia XI dan Seminar Ilmiah. Jakarta: 5-7 November 2001
- Daryono. 2008. *Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi*. (<http://daryono.staff.uns.ac.id>). Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.
- Indonesia. Perpustakaan Nasional RI. 2002. *Pedoman Pembinaan Tenaga Fungsional Pustakawan*.
- Indonesia. Perpustakaan Nasional RI. 2011. *Kebijakan Perpustakaan Nasional RI dalam Sertifikasi Pustakawan*, Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional IPI, tanggal 12 Oktober di Manado.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Kiprah Pustakawan, seperempat abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998*. Jakarta : PB IPI, 1998
- Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: pustaka Book Publisher.
- Megaminingsih, Tri Lestari. 1999. *Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Layanan di Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Media Informasi, Vol. XIII, No. 3, tahun 1999: p.22-27. Yogyakarta: UPT Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Sulistyo, Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sutarno NS, 2005. *Tanggungjawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi*. Jakarta : Pantai Rei Arruz Media.
- Suwarno, Wiji, 2010. *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Jakarta: Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang *Perpustakaan*.
- Wirawan. 1996. *Profesi Pustakawan Indonesia dalam Era Globalisasi*. Makalah pada Semiloka Perpustakaan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta 11-14 Nopember 1996 di Jakarta.